

**SERI SIKLUS
PNPM Mandiri Perkotaan**

**Panduan Fasilitator
Pemetaan Swadaya (PS)**



Seri Siklus PNPM Mandiri Perkotaan
Panduan Fasilitator
Pemetaan Swadaya

Penyusun: Marnia Nes

Penyunting: Sonny Hk.

Tata-letak & Ilustrasi: Eddie B. Handono

Cetakan Pertama, Januari 2008

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri - Perkotaan

Departemen Pekerjaan Umum
Direktorat Jenderal Cipta Karya

Pengantar

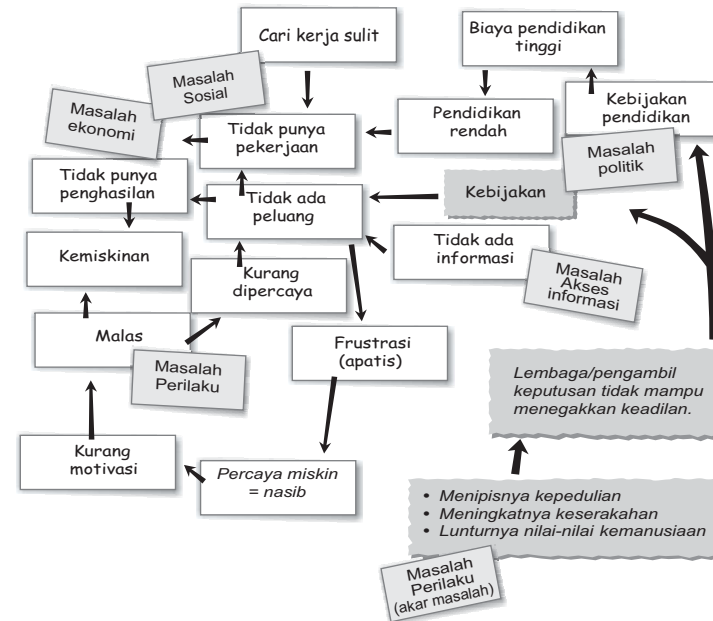
Pemetaan Swadaya merupakan kegiatan yang saling terkait dengan refleksi kemiskinan. Melalui refleksi kemiskinan salah satu keluaran yang dihasilkan adalah berbagai penyebab masalah kemiskinan yang pada ujungnya bersumber kepada lunturnya nilai-nilai kemanusiaan atau sikap perilaku orang yang menyebabkan meningkatnya keserakahan dan menipiskan kepedulian. Dalam pemetaan swadaya permasalahan tersebut digali informasinya sehingga akan didapatkan data yang lengkap dari setiap permasalahan.

Melalui proses pemetaan swadaya masyarakat melakukan proses belajar untuk:

Menggali informasi. Bagaimana kondisi nyata dari masalah-masalah yang dikemukakan dan dirumuskan pada saat refleksi kemiskinan (sosial menyangkut pendidikan, kesehatan, pengangguran, ekonomi, lingkungan, kelembagaan, dan kepemimpinan)? Masalah-masalah tersebut harus didukung oleh data dan fakta, sehingga diperlukan proses penelitian untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan.

Mengkaji. Informasi dan fakta yang sudah didapatkan dianalisa dan dikaji bersama. Proses ini merupakan analisa kritis terhadap berbagai kondisi yang ada berdasarkan informasi dan fakta tadi untuk dicari sebab akibatnya termasuk kelompok-kelompok yang terkena dampak dari masalah yang ada (kelompok sasaran). Setiap informasi yang muncul dianalisa apakah hal itu merupakan masalah yang sebenarnya atau hanya merupakan gejala saja.

Merumuskan masalah. Pada tahapan ini masalah yang sudah ditemukan dan disepakati bersama dikelompokkan (pengorganisasian masalah), kemudian dianalisa hubungan sebab akibatnya dengan kembali membuat Pohon Masalah seperti yang dilakukan dalam refleksi kemiskinan. Dengan demikian dalam melakukan analisa kritis akan terjadi proses refleksi yang berulang-ulang. Artinya refleksi kemiskinan tidak hanya terjadi pada saat siklus yang pertama akan tetapi terus dilakukan dalam siklus Pemetaan swadaya.



*Penting diingat
Partisipasi atau pendekatan dari
bawah bukan dalam arti
masyarakat dibiarkan untuk
semaunya, akan tetapi fasilitator
harus membimbing mereka
menemukan berbagai alternatif
pemecahan masalah dan
konsekuensi–konsekuensi dari
berbagai alternatif tersebut
sehingga keputusan yang diambil
oleh masyarakat atas dasar
kesadaran kritis bukan karena
"asal mudah" dilakukan.*

Pengertian swadaya dalam hal ini yaitu semua proses penggalian informasi, analisa dan rumusan masalah dilakukan oleh masyarakat. 'Orang luar' (Fasilitator) hanya memfasilitasi proses, bahkan jika memungkinkan Fasilitasi juga dilakukan oleh Relawan yang merupakan unsurnya masyarakat. Keterlibatan 'orang luar ' diharapkan sekecil mungkin, artinya peran Fasilitator (P2KP) hanya diperlukan untuk mendorong masyarakat agar mereka belajar untuk menganalisa dan mencari alternatif pemecahan masalah, apabila masyarakat memang belum mampu mengembangkan gagasan yang dibutuhkan.

Pada pelaksanaannya proses penggalian informasi, analisa masalah, dan perumusan masalah seringkali tidak berdiri sendiri-sendiri, akan tetapi merupakan proses yang dilaksanakan sekaligus. Metode dan teknik yang dikembangkan untuk Pemetaan Swadaya adalah metode yang lebih menekankan pada proses diskusi masyarakat. Alat-alat kajian (tools) yang dikembangkan adalah alat untuk mengajak masyarakat terlibat dalam proses penggalian informasi, analisa dan perumusan masalah/kebutuhan, sehingga melalui proses tersebut sebetulnya masyarakat yang terlibat menjadi peneliti bagi diri dan kehidupan lingkungannya sendiri.

Tujuan

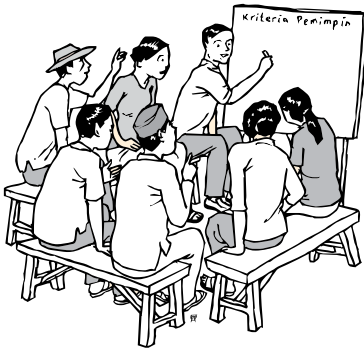
Melalui proses Pemetaan Swadaya hasil yang diharapkan adalah:

- Masyarakat memahami persoalan nyata mereka sendiri berdasarkan kepada fakta dan informasi yang ada, sehingga yang mereka rumuskan bukan daftar keinginan seseorang akan tetapi daftar kebutuhan yang bermanfaat untuk lingkungannya terutama dalam rangka penanggulangan kemiskinan.
- Masyarakat dapat menyadari persoalan kehidupan dan lingkungan yang mereka hadapi, sehingga diharapkan terjadi pemahaman terhadap kondisi warga di lingkungannya. Penyadaran ini merupakan renungan terhadap permasalahan dirinya dan orang lain di lingkungannya sehingga diharapkan tumbuh kebersamaan, berbagi informasi dan pengetahuan, toleransi, kepedulian terhadap warga sekitar dan mencari jalan keluar dari keadaan-keadaan yang dianggap mengganggu (masalah).
- Masyarakat menyadari potensi-potensi yang dimiliki oleh mereka, sehingga pemecahan masalah (pemenuhan kebutuhan) tidak semata-mata didasarkan kepada kehendak dan bantuan 'orang luar' akan tetapi lebih banyak mengutamakan kemampuan sumberdaya dan swadaya masyarakat



Keluaran

- Adanya data dan rumusan permasalahan warga miskin menyangkut permasalahan sosial, ekonomi dan lingkungan.
- Adanya daftar KK dan jiwa miskin serta permasalahan yang khusus dari masing–masing jiwa.
- Adanya peta wilayah, peta sebaran warga miskin dan peta–peta topikal (kesehatan, pendidikan, sarana–prasarana lingkungan, dan sebagainya sesuai kebutuhan).
- Adanya kriteria kepemimpinan yang disepakati oleh masyarakat sebagai dasar bagi pemilihan anggota "Badan Keswadayaan Masyarakat"
- Teridentifikasinya lembaga pengambil keputusan untuk penanggulangan kemiskinan di tingkat Kelurahan/Desa, yang sesuai dengan kriteria BKM/LKM
- Adanya kebutuhan masyarakat terhadap lembaga untuk penanggulangan kemiskinan yang demokratis.
- Adanya daftar potensi untuk pemecahan masalah–masalah sosial, ekonomi dan lingkungan.
- Adanya rencana kerja untuk pembangunan BKM dan pengembangan KSM



Alat dan Bahan

- Kertas plano
- Kertas roti/kertas minyak
- Spidol kecil warna-warni
- Spidol besar warna-warni
- Kertas manila beberapa warna

Penyelenggara

- Pemetaan di tingkat RW/Dusun: Ketua RW, Tim PS dan Fasilitator
- Lokakarya tingkat Kelurahan/desa: Lurah/Kepala Desa, Tim PS dan Fasilitator

Tahap Persiapan

Agar proses Pemetaan Swadaya memperoleh hasil yang optimal, dan memperkecil risiko kegagalan, serta mempermudah pelaksanaan di lapangan, maka perlu persiapan yang baik. Di bawah ini dijelaskan mengenai langkah–langkah minimal yang harus dilaksanakan sebelum mengawali Pemetaan Swadaya.

1. Pembentukan Tim PS

Pada tahap pertama, perlu disepakati dengan relawan dan berbagai pihak di tingkat kelurahan/desa, siapa yang akan memfasilitasi keseluruhan kegiatan Pemetaan Swadaya. Tidaklah mungkin keseluruhan warga masyarakat menjadi Fasilitator dalam proses PS, maka harus dikembangkan Tim yang akan terlibat untuk memfasilitasi dan mengorganisir proses yang disebut dengan Tim PS.

Anggota Tim ini terdiri dari:

- (1) relawan–relawan warga yang mau menyumbangkan waktu, tenaga, dan pikirannya;
- (2) Tim Fasilitator dan apabila dirasa perlu dan memungkinkan jumlah Tim PS ini dapat ditambah dengan melibatkan lembaga–lembaga atau individu yang mempunyai kepedulian dan atau kemampuan dalam hal penggalian informasi dan kajian yang sifatnya teknis (sebagai narasumber untuk bidang–bidang teknis tertentu misal dari puskesmas, guru, dinas pekerjaan umum dan sebagainya).
- (3) Akan sangat baik kalau melibatkan anggota Komunitas Belajar Perkotaan (KBP)

Perbandingan antara 'orang luar' dan 'orang dalam' dalam Tim PS sebaiknya seimbang. Jika kebanyakan anggotanya 'orang luar', akan ada kecenderungan 'orang luar' mendominasi dan berdiskusi di antara mereka sendiri. Komposisi dari relawan juga sebaiknya berimbang antara berbagai golongan (apabila memungkinkan disesuaikan dengan relawan yang ada), seperti lelaki dan perempuan, wakil kelompok tua dan muda dan sebagainya.

Tim dibagi dalam beberapa sub Tim sesuai dengan kebutuhan kajian yang akan dilakukan dan jumlah Dusun/RW di kelurahan/desa. Semakin banyak sub tim, akan semakin baik mengingat kajian yang dilakukan cukup banyak.

2. Persiapan Teknis

Sebelum penyelenggaraan musyawarah, Tim Panitia terlebih dahulu harus mempersiapkan:

- Menentukan siapa yang akan diundang dalam pemetaan swadaya tingkat dusun/RW
- Menyiapkan undangan (peserta pertemuan sesuai yang telah disepakati)
- Mengundang baik secara lisan maupun tertulis kepada warga untuk hadir dalam pertemuan/diskusi kajian
- Waktu dan tempat pelaksanaan harus disepakati bersama masyarakat dan perangkat kelurahan/desa.
- Mempersiapkan tempat pertemuan (bisa di rumah salah satu warga, balai RW atau tempat lain sesuai kesepakatan).
- Mempersiapkan konsumsi.



- Mempersiapkan alat-alat dan bahan yang diperlukan.
- Biaya pertemuan, seperti untuk alat tulis seperti plano dan spidol besar dan konsumsi sederhana, masyarakat perlu didorong untuk swadaya agar terbiasa berkontribusi dalam kegiatan-kegiatan bagi kepentingan mereka sendiri.
- Harus dipastikan adanya pencatat proses yang akan mendokumentasikan hasil Pemetaan Swadaya.

3. Persiapan Materi

Pahami dahulu materi dari topik yang akan dibahas dalam setiap kajian (Tim PS sebelumnya akan mendapatkan bimbingan dari fasilitator).

Pelajari panduan fasilitasi untuk setiap kajian dan catatlah kata-kata kunci yang harus diperhatikan.

Kalau perlu, pelajari juga beberapa referensi yang disarankan dalam panduan ini atau dari sumber lain.

Penting diingat

Sebaiknya untuk lokasi yang pertama (dusun/RW pertama), fasilitasi dilakukan oleh fasilitator dan diikuti oleh semua sub tim PS sebagai proses belajar. Baru kemudian masing-masing sub tim PS menyebar ke lokasi dusun/RW yang menjadi tanggungjawabnya.

4. Latihan (simulasi)

Sebelum memfasilitasi diskusi bersama masyarakat, Tim PS sebaiknya berlatih terlebih dahulu dengan melakukan simulasi bersama teman-teman satu tim, agar pada pelaksanaan diskusi Anda lebih siap. Lakukan perbaikan terus menerus selama proses pemetaan swadaya. Setiap akhir dari kajian, bahas bersama informasi apa saja yang sudah didapatkan, apakah ada kesulitan dalam memfasilitasi, apa yang harus diperbaiki, lakukan persiapan dan simulasi untuk kegiatan kajian selanjutnya.

5. Pengkajian Data Sekunder

Data atau informasi sekunder merupakan informasi yang sudah tersedia atau berasal dari dokumen yang ada. Data ini antara lain mencakup keterangan mengenai keadaan masyarakat dan lingkungan tempat masyarakat tinggal, seperti topografi dan tataguna lahan, pengairan, jenis-jenis mata pencaharian masyarakat, pola konsumsi dan produksi, jumlah dan perubahan penduduk dari tahun ke tahun, kualitas dan fasilitas pendidikan, kualitas dan fasilitas kesehatan, program-program yang sudah ada sebelum P2KP, lembaga-lembaga masyarakat dan kegiatannya, dan lain-lain yang dianggap perlu.

Tujuan dari pengumpulan data sekunder adalah:

- Mendapatkan gambaran awal keadaan desa, baik masyarakat maupun lingkungannya
- Memperkirakan kebutuhan informasi yang perlu dikaji lebih lanjut di lapangan sehingga Tim PS bisa menyusun rencana kajian.
- Sebagai data pembanding terhadap informasi yang diperoleh langsung dari masyarakat (fungsi triangulasi)

Bisa jadi data tersebut sudah terkumpul pada saat kegiatan pemetaan sosial yang sudah dilaksanakan oleh Tim Fasilitator pada saat awal masuk ke wilayah sasaran atau dari hasil refleksi kemiskinan yang telah dilaksanakan dalam siklus sebelumnya.

6. Penyusunan Rancangan Kajian

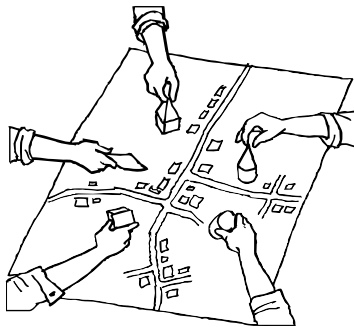
Tahap selanjutnya dari kegiatan persiapan adalah menyusun rancangan kajian yang akan menjadi acuan penerapan diskusi–diskusi penggalian informasi dan proses kajian di lapangan.

Sebelum melaksanakan kegiatan PS di lapangan, Tim PS perlu merancang metode dan teknik yang akan dipakai dalam melakukan penggalian informasi, pengkajian dan perumusan masalah. Rancangan kajian yang baik adalah langkah awal yang menentukan bagi pekerjaan selanjutnya. Penyusunannya dilakukan oleh Fasilitator dengan anggota masyarakat yang telah dipersiapkan untuk menjadi anggota Tim Inti, serta stakeholder yang dapat membantu.

Berbeda dengan 'desain penelitian' yang baku dan standar, sebagaimana dilakukan oleh para peneliti akademik. Rancangan PS tidak bersifat baku melainkan hanya sekedar acuan bagi pekerjaan di lapangan. Penyesuaian akan dilakukan oleh Tim PS sesuai dengan proses di lapangan.

Agar PS menjadi lebih jelas arahnya, gagasan-gagasan dirumuskan dalam bentuk pernyataan tujuan penerapan PS. Dalam rancangan PS, tujuan ini dicantumkan sebagai hasil yang ingin dicapai dalam menyelenggarakan kegiatan penerapan PS.

Walaupun dalam konteks PNPB Mandiri Perkotaan, isu utama yang menjadi kajian adalah permasalahan kemiskinan akan tetapi di dalamnya tentu memuat isu–isu lain seperti pendidikan, sanitasi lingkungan, perumahan, kesehatan, termasuk kesehatan reproduksi, masalah gizi, penyakit menular, kesehatan bayi dan balita dan lainnya, ekonomi, kepemimpinan, kelembagaan, sensitivitas gender, masalah anak terlantar dan lainnya, sesuai dengan masalah-masalah yang teridentifikasi pada saat refleksi kemiskinan.



Setelah tujuan PS terumuskan, kemudian dilakukan penentuan kebutuhan informasi yang dianggap penting untuk dikaji di lapangan. Penentuan informasi ini dilakukan selain agar waktu, tenaga, serta biaya dapat dihemat, juga agar proses dan hasil lapangan dapat memaksimalkan. Tanpa kegiatan ini bisa jadi kita akan banyak membuang waktu untuk mengumpulkan berbagai informasi yang ternyata tidak diperlukan.

Langkah-langkah yang perlu dilakukan di dalam menentukan kebutuhan informasi antara lain adalah:

Menggunakan data sekunder dan hasil refleksi kemiskinan yang telah dianalisis sebagai dasar dari penentuan topik-topik informasi kajian selanjutnya; Anggota Tim PS yang merupakan anggota masyarakat bisa dimanfaatkan sebagai narasumber untuk mengambil keputusan tentang penentuan topik-topik yang penting.

Merumuskan tujuan khusus kajian dari setiap topik dan analisis kemungkinan keterkaitan satu topik dengan topik lainnya berdasarkan kepada data sekunder atau penjelasan dari masyarakat pada saat refleksi kemiskinan.

7. Pemilihan Metode/Teknik

Berdasarkan penentuan jenis informasi yang akan digali (yang sudah ditentukan pada proses sebelumnya), maka dapat dipilih dan atau ditentukan teknik/metode yang sesuai untuk pengumpulan informasi tertentu, walaupun sebenarnya tidak bersifat baku, dan bisa diubah sesuai kebutuhan.

Berikut adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pemilihan teknik/metode:

- Walau setiap teknik yang ada biasa digunakan untuk mengkaji informasi tertentu, tetapi sebenarnya bisa disesuaikan dengan jenis informasi lain.
- Sebuah teknik kajian dikatakan memiliki penekanan khusus untuk mengkaji informasi tertentu sebenarnya tidak tepat. Memang benar, sebuah teknik telah biasa dipergunakan untuk mengkaji informasi tertentu, tetapi sebenarnya tidak harus demikian karena bisa dilakukan penyesuaian–penyesuaian.
- Sebuah informasi juga tidak hanya diperoleh dari sebuah teknik saja, tetapi dapat pula dilengkapi dengan hasil yang didapat melalui teknik-teknik lainnya.

Contoh:

Bagan alur produksi dan pemasaran untuk mengkaji tentang alur kegiatan usaha sampai dijual atau dipasarkan. Ternyata di dalam diskusi dengan teknik kelembagaan (diagram venn), muncul juga masalah pemasaran karena adanya lembaga koperasi desa yang ternyata tidak dapat bersaing dengan tengkulak. Wawancara Keluarga Miskin biasanya juga memunculkan informasi mengenai masalah pemasaran hasil usaha keluarga.

8. Penentuan Sumber Informasi

Penentuan sumber informasi bisa perlu bisa tidak, karena pada dasarnya dalam penerapannya PS tidak membatasi anggota masyarakat mana saja yang terlibat di dalam diskusi. Artinya, walaupun unsur-unsur dalam masyarakat yang akan dilibatkan dipertimbangkan, tidak ada pembahasan yang ketat. Tetapi harus dipertimbangkan kohesivitas sosial di masing–masing lokasi yang menjadi satuan analisa (kajian), karena tingkat keakraban dan hubungan sosial bisa mempengaruhi apakah warga bisa menjadi narasumber untuk permasalahan di sekitarnya.

Beberapa contoh dalam mempertimbangkan pemilihan sumber informasi, antara lain:

Kajian tentang alur pemasaran akan lebih baik apabila memperoleh informasi dari anggota masyarakat yang bekerja sebagai 'pedagang-pengumpul' bandar untuk memahami bagaimana proses pemasaran dilakukan setelah pengumpul itu membeli dari produsen.

Kajian mengenai jenis-jenis usaha produktif (menghasilkan uang) yang dilakukan oleh perempuan, akan lebih baik bila dilakukan secara khusus dengan kelompok ibu-ibu selain dengan kelompok diskusi campuran antara bapak-bapak dan ibu-ibu (hasilnya seringkali berbeda)

Kadang-kadang kita juga perlu 'menghindari' sumber informasi tertentu. Misalnya, kajian kelembagaan desa/kelurahan sebaiknya tidak perlu kehadiran seseorang (tokoh suatu lembaga) dalam diskusi dengan masyarakat yang sedang bersengketa dengannya karena hal ini akan menimbulkan konflik terbuka. Sebaliknya kepada sumber informasi yang sedang bersengketa perlu dilakukan pendekatan khusus.

Tahap Pelaksanaan



PANDUAN FASILITATOR PEMETAAN SWADAYA

Pelaksanaan Kajian Tingkat Dusun/RW

Pelaksanaan kajian tingkat dusun/.RW dibagi ke dalam beberapa kajian yaitu:

- Pemetaan Swadaya 1, terdiri dari Pemetaan Wilayah; Pemetaan Sebaran Warga Miskin; Kajian Sarana dan Prasarana Lingkungan Perumahan
- Pemetaan Swadaya 2, yaitu wawancara KK miskin dan Transek (observasi permasalahan lingkungan)
- Pemetaan Swadaya 3, terdiri dari kajian berbagai permasalahan ekonomi
- Pemetaan Swadaya 4, terdiri dari pemetaan tingkat kesehatan warga miskin dan kajian berbagai permasalahan kesehatan
- Pemetaan Swadaya 5, terdiri dari pemetaan tingkat pendidikan warga miskin dan kajian berbagai permasalahan pendidikan
- Pemetaan Swadaya 6, kajian Kelembagaan dan Kepemimpinan

Sebaiknya untuk wawancara semi terstruktur dan transek dibentuk sub tim tersendiri, agar kegiatan kajian ini bisa dilakukan paralel dengan kegiatan kajian yang lain asalkan kajian pemetaan swadaya 1 sebagai dasar sudah dilakukan.

Panduan pelaksanaan setiap kelompok kajian dapat dibaca pada buku Panduan Pelaksanaan Kajian Pemetaan Swadaya (Buku 4 A , Seri Siklus PNPM Mandiri Perkotaan)

Dalam pelaksanaan kajian, harus selalu dilakukan kegiatan berbagi informasi antar sub-tim. Yang dimaksud 'berbagi informasi' antar Sub-Tim adalah pembahasan bersama informasi-informasi yang telah dikumpulkan. Caranya, dengan melakukan diskusi dalam Tim besar untuk:

- Saling melengkapi informasi antar Sub-Tim
- Saling menghubungkan informasi antar Sub-Tim
- Mencek-silang antara informasi dari masyarakat dengan data sekunder, bila ada triangulasi
- Menentukan informasi-informasi yang dianggap masih 'meragukan' atau kurang lengkap untuk dicek-silang kembali kepada masyarakat (triangulasi)
- Membahas jadwal tentatif dan perubahan yang terjadi
- Merencanakan pembagian tugas sub-Tim untuk keesokan harinya.

Keseluruhan proses maupun informasi yang muncul dalam diskusi harus dicatat dan didokumentasikan. Gambar-gambar yang dibuat pada saat melakukan kajian selain disalin pada kertas yang lain juga aslinya dikumpulkan dengan baik karena akan dipergunakan sebagai bahan diskusi pada saat perumusan masalah tingkat desa/kelurahan.

Lokakarya Kelurahan/Desa untuk Perumusan Masalah

1. Persiapan Bahan

Seluruh informasi hasil kajian tingkat dusun/RW dikumpulkan oleh Tim PS dan dikaji bersama. Hasil rumusan ini akan dipakai sebagai bahan presentasi dan pembahasan dalam lokakarya PS tingkat kelurahan/desa.

Untuk mempermudah proses, hasil rumusan ditulis pada selebar kertas besar mengenai:

- Berbagai masalah dan potensi yang terkumpul dari kajian–kajian yang sudah dilakukan dari setiap dusun terdiri dari: grafik–grafik dan bagan–bagan yang sudah dihasilkan; matrik permasalahan, potensi dan usulan pemecahan masalah; serta pohon permasalahan.
- Daftar KK dan jiwa miskin serta tipologi permasalahannya.
- Peta–peta tematik (sebaran warga miskin, lingkungan, kesehatan, pendidikan) kelurahan/desa yang merupakan gabungan dari pet –peta tematik setiap dusun/RW. Sebaiknya peta–peta ini dibuat dalam lembar kertas kalkir atau kertas minyak agar lebih tahan lama.

Tentukan siapa tim PS yang akan mempresentasikan hasil–hasil kajian dalam lokakarya. Sebaiknya lakukan praktek presentasi terlebih dahulu, supaya dalam pelaksanaannya tidak teragap–gagap. Tentukan informasi–informasi yang dianggap penting dan harus ditonjolkan.

Penting Diingat :

Dari grafik, bagan dan peta yang sudah dihasilkan bisa terlihat secara visual masalah–masalah apa yang paling menonjol pada tingkat kelurahan dan lokasi–lokasi mana saja yang mempunyai permasalahan paling parah. Kondisi–kondisi ini penting untuk ditonjolkan dalam presentasi untuk mengajak masyarakat melihat prioritas pemecahan masalah berdasarkan kondisi nyata yang ada, bukan atas dasar pembagian wilayah adminisratif, kepentingan golongan, atau bias gender.

2. Persiapan Teknis

Persiapan teknis yang perlu dilakukan antara lain adalah:

- Menyepakati jadwal pertemuan dengan masyarakat
- Mengundang berbagai kelompok masyarakat untuk hadir dalam pertemuan (bisa dengan lisan bisa dengan menyebarkan undangan)
- Mempersiapkan tempat pertemuan (yang agak luas)
- Mempersiapkan konsumsi bersama masyarakat dan pihak Kelurahan/Desa
- Mempersiapkan alat dan bahan seperti, kartu-kartu, kertas besar, lem, selotif dan alat tulis.
- Menentukan agenda lokakarya



3. Pelaksanaan Lokakarya

Satu: Pembukaan oleh Lurah/Kepala Desa

Dua: Pembacaan Do'a

Tiga: Sambutan–sambutan

- Sambutan diberikan oleh PJOK dan perwakilan dari Dinas apabila hadir.

Empat: Penjelasan maksud dan Tujuan

- Pemimpin lokakarya menyampaikan maksud dan tujuan Lokakarya Pemetaan Swadaya.

Lima: Penyajian Hasil Pemetaan Swadaya

- Tahap selanjutnya adalah penyampaian seluruh hasil kajian kepada peserta pertemuan, sesuai dengan bahan–bahan hasil kajian dari setiap dusun/RW yang sudah disiapkan. Presentasi bisa dilakukan oleh beberapa orang wakil Tim PS.
- Setelah selesai presentasi, pemimpin lokakarya memfasilitasi diskusi dengan memberi kesempatan kepada peserta untuk memberikan tanggapan dan masukan. Diskusikan bersama dan sepakati hasilnya.
- Apabila ada tambahan–tambahan usulan dari peserta yang belum tercantum dalam hasil kajian pemetaan swadaya, catat tambahan itu dalam kertas plano dan dokumentasikan hasil PS yang sudah tersedia.

Diskusikan bersama peserta:

- *Masalah–masalah mana yang menjadi penyebab dari masalah yang lain*
- *Untuk masalah pada tingkat 4 (gejala), masalah–masalah apa yang paling banyak menyebabkan masalah lainnya, disebut dengan simpul masalah.*
- *Masalah–masalah mana yang menjadi akibat masalah yang lain.*
- *Catatlah simpul masalah dalam kertas plano.*

Enam: Pengorganisasian Masalah

- Pemimpin Lokakarya menjelaskan kepada peserta bahwa masalah – masalah yang muncul di masyarakat sangat beragam topik-topiknya, dan seperti yang sudah dibahas dalam refleksi kemiskinan masalah ini sebetulnya saling berkaitan, oleh karena itu perlu dilakukan pengorganisasian masalah untuk melihat hubungan sebab akibat dari masalah – masalah yang sudah ditemukan dalam PS.
- Pemimpin lokakarya dengan dibantu oleh relawan/fasilitator mengajak peserta untuk menyusun pengorganisasian masalah.
- Fasilitator/relawan menuliskan semua masalah yang sudah didapat dari hasil presentasi dan diskusi dalam kartu–kartu (metaplan), satu kartu untuk satu pernyataan masalah.
- Ajaklah peserta untuk menganalisa hubungan sebab akibatnya dari masalah–masalah yang sudah ditulis dalam kartu tadi sehingga menjadi pohon permasalahan seperti yang dilaksanakan dalam refleksi kemiskinan, akan tetapi dalam kegiatan ini masalah–masalah yang muncul sudah lebih jelas karena hasil kajian yang mendalam. Masalah–masalah itu kemudian dirumuskan menjadi masalah tingkat Kelurahan/Desa.

Dari hasil pengorganisasian masalah ini bisa didapatkan daftar simpul masalah yang bisa digunakan sebagai salah satu acuan untuk prioritas masalah dalam penyusunan PJM Pronangkis.

Penting diperhatikan:

Berdasarkan pengalaman, dalam proses menetapkan masalah, sebab masalah dan akibat, sering tertukar. Untuk itu Pemandu perlu menjelaskan pengertian ini berulang-ulang

Terkadang satu kartu masalah berhubungan dengan banyak kartu yang lain. Jika demikian, satu masalah bisa dibuat menjadi beberapa kartu.

Pemandu sebaiknya sabar dalam memfasilitasi diskusi. Biarkan peserta untuk memproses sendiri hubungan sebab akibat ini. Pemandu hanya membantu dengan pertanyaan kritis agar peserta mempertimbangkan kesimpulannya dengan cermat.

Tujuh: Penandatanganan Berita Acara Kesepakatan

Pemimpin Lokakarya membacakan hasil kesepakatan mengenai (1) daftar permasalahan dan potensi yang akan diajukan kepada Tim Perencanaan Partisipatif (Tim PP) dan BKM/LKM beserta dengan seluruh dokumentasi yang sudah dihasilkan. (2) kesepakatan untuk membangun BKM/LKM (apakah itu menggunakan lembaga yang sudah ada atau membentuk baru) dan memimpin penandatanganan berita acara.

Delapan: Penjelasan Pembangunan BKM/LKM, KSM dan PJM Pronangkis

Fasilitator/relawan menjelaskan kepada peserta bahwa tahapan selanjutnya dalam siklus penanggulangan kemiskinan adalah Pembangunan BKM/LKM, pengembangan KSM dan penyusunan perencanaan Program Jangka Menengah Penanggulangan Kemiskinan (PJM Pronangkis)

- Jelaskan bahwa untuk mengatasi permasalahan kelembagaan dan kepemimpinan maka PNPM Mandiri Perkotaan akan memfasilitasi proses pembangunan BKM, baik memfungsikan lembaga yang sudah ada maupun membentuk baru.
- Selain itu agar warga miskin lebih mudah mendapatkan akses, bisa bekerja sama dengan warga yang lain, ikut berperan aktif dalam pembangunan maka PNPM Mandiri Perkotaan akan memfasilitasi warga miskin untuk terlibat dalam kelompok–kelompok swadaya masyarakat (KSM) baik menjadi anggota kelompok yang sudah ada maupun membentuk kelompok yang baru.
- Selanjutnya, untuk memecahkan persoalan–persoalan di tingkat gejala (kesehatan, pendidikan, pengangguran, air bersih, dsb) maka PNPM Mandiri Perkotaan akan memfasilitasi Penyusunan PJM Pronangkis.
- Jelaskan bahwa proses pembangunan BKM/ LKM akan dilaksanakan paralel dengan pengembangan KSM, sedangkan penyusunan PJM Pronangkis akan dilaksanakan setelah BKM terbentuk, karena penyusunan PJM akan difasilitasi oleh anggota BKM/LKM .
- Ajaklah peserta untuk menonton VCD pembangunan BKM/LKM, kemudian beri kesempatan kepada peserta untuk melakukan tanya jawab.
- Jelaskan secara lebih jelas mengenai proses pembangunan BKM/LKM dan prinsip–prinsipnya, (sebagaimana dipaparkan dalam halaman berikut)

Apa Itu BKM

BKM /LKM merupakan kepemimpinan kolektif dari organisasi masyarakat warga suatu kelurahan yang anggota–anggotanya dipilih berdasarkan kriteria kemanusiaan, sehingga mereka dapat berperan secara penuh sebagai pemimpin masyarakat warga.

Kepemimpinan kolektif artinya tidak ada struktur organisasi BKM/LKM seperti ketua, wakil, dst. artinya, semua anggota mempunyai kedudukan yang sejajar dan mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Kolektifitas kepemimpinan ini penting agar dapat menghasilkan keputusan yang lebih adil dan bijaksana karena tidak didasarkan pada kekuatan dan kedudukan seseorang.

Anggota BKM/LKM dipilih berdasarkan kriteria nilai–nilai kebaikan yang disepakati oleh warga masyarakat dalam kegiatan kajian kepemimpinan. Dipilih artinya bukan ditunjuk karena penunjukan hanya menghasilkan orang–orang yang hanya dipercaya oleh orang–orang yang menunjuknya saja (biasanya sebagian kecil warga masyarakat). Karena itu pula dalam proses pemilihan anggota BKM /LKM juga tidak boleh ada kampanye ataupun pencalonan. Pencalonan sama dengan penunjukan, karena orang–orang yang dicalonkan oleh kelompok tertentu apabila sudah terpilih biasanya akan merasa mempunyai hutang budi dan akan cenderung berpihak kepada kelompok yang mencalonkan dirinya saja. Demikian juga kampanye biasanya cenderung digunakan untuk mengobral janji–janji manis yang belum tentu ditepati, sementara orang–orang yang mempunyai sifat kebaikan biasanya tidak mengkampanyekan kebaikannya karena sesungguhnya perilaku dapat dinilai oleh orang lain dari apa yang diperbuat sehari–hari (rekam jejak) bukan dari kata-kata.

Dengan demikian, siapapun yang terpilih adalah orang–orang yang dapat dipercaya oleh warga masyarakat banyak bukan oleh segolongan elit saja, untuk itu pemilihan perlu melibatkan seluruh warga.

Anggota BKM/LKM dalam menjalankan tugasnya tidak dibayar, karena menjadi anggota BKM bukan untuk mencari pekerjaan akan tetapi merupakan peluang bagi orang–orang yang mempunyai kepedulian sosial untuk memperjuangkan nilai–nilai luhur yang diyakininya. Jadi, anggota BKM/LKM menjalankan fungsinya berdasarkan kerelawanan, sebagai wujud dari nilai ikhlas tanpa pamrih dan sikap sadar untuk memberikan waktu, tenaga dan pemikirannya bagi diri dan orang lain. Dengan tidak dibayar, anggota BKM/LKM akan lebih merdeka untuk mengambil keputusan karena tidak terikat pada orang–orang yang membayar.

Penting diperhatikan:

Dalam diskusi tentang Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), peserta harus benar-benar paham dengan maksud dan tujuan dari KSM sebagai sarana untuk saling belajar, saling peduli, saling memberikan informasi, saling berkomunikasi di antara anggotanya. Masalah-masalah yang biasanya dihadapi sendiri akan lebih ringan apabila dipecahkan bersama-sama. Jadi KSM dibangun bukan karena adanya BLM atau semata-mata dibentuk untuk mendapatkan bantuan uang.

- Setelah berdiskusi tentang BKM/LKM, ajaklah peserta untuk menonton VCD pengembangan KSM, kemudian beri kesempatan kepada peserta untuk melakukan tanya jawab.

Sembilan: Rencana Kerja Sosialisasi Hasil PS, Pembangunan BKM/LKM dan Pengembangan KSM

- Pemimpin musyawarah menjelaskan tentang perlunya menyusun rencana kerja bersama untuk sosialisasi hasil PS, pelaksanaan pembangunan BKM dan pengembangan KSM.

1) Sosialisasi hasil PS menyangkut:

- Peta sebaran warga miskin dan peta-peta tematik
- Daftar permasalahan
- Daftar potensi
- Usulan pemecahan masalah

2) Pelaksanaan Pembangunan BKM/LKM menyangkut:

- Sosialisasi pembangunan BKM/LKM kepada masyarakat luas
- Penyusunan draft Anggaran Dasar (AD)
- Penyusunan peraturan pemilihan anggota BKM/LKM
- Pelaksanaan pemilihan anggota BKM tingkat komunitas (RT/komunitas terkecil)
- Pelaksanaan pemilihan anggota BKM/LKM tingkat kelurahan/desa

3) Pelaksanaan pengembangan KSM menyangkut:

- Sosialisasi pengembangan KSM
- Pelaksanaan diskusi–diskusi dinamika kelompok dengan calon anggota KSM

Untuk setiap item rencana kerja buatlah jadual pelaksanaan dan tetapkan penanggung-jawab kegiatan

Sepuluh: Penutupan dan Do'a

Seluruh kegiatan lokakarya ini didokumentasikan, termasuk hasil–hasil pengorganisasian masalah yang akan dipakai dalam sebagai dasar penyusunan PJM Pronagkis tingkat Kelurahan/Desa.

